

# Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud di Indonesia

**Arys Arya Anfield**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [arysarya1009@gmail.com](mailto:arysarya1009@gmail.com)

**Deby Shintawulan Fransiska**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [debyfransiska212@gmail.com](mailto:debyfransiska212@gmail.com)

**Abstrack.** *Fraud refers to deception committed by individuals or groups to gain undue advantage. Fraud can occur in various fields, including business, government, and even society. Fraud can cause huge losses to the business world, government, and society. One of the efforts to prevent and detect fraud is to conduct an investigative audit. An investigative audit is the process of collecting and analyzing evidence to determine whether fraud has occurred. Investigative audits can be conducted by internal auditors, external auditors, or law enforcement agencies. This study aims to analyze the impact of investigative audits on fraud disclosure in Indonesia. This study uses secondary data obtained from various sources including research reports, journal articles and news. The findings show that investigative audits play an important role in uncovering fraud in Indonesia. Investigative audits can provide strong evidence to support findings of fraud. This evidence can be used to take legal action against the fraudster. Here are some factors that influence the effectiveness of investigative audits in uncovering fraud:*

- Investigate auditor skills and experience
- Availability of resources
- Related Party Cooperation

*Therefore, it is necessary to improve the quality of investigative audits so that fraud can be prevented and detected more effectively. This can be achieved by improving the skills and experience of investigative auditors, providing adequate resources and establishing good cooperation with interested parties. The following are some recommendations to improve the effectiveness of investigative audits in Indonesia in uncovering fraud:*

- Improve education and training standards for investigative auditors
- Provide adequate resources for investigative audits
- Establish good cooperation between investigative auditors, company management, employees and regulatory authorities.

**Keywords:** *Fraud, investigative audit, fraud disclosure, Indonesia*

**Abstrak.** *Penipuan mengacu pada penipuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Penipuan dapat terjadi di berbagai bidang, baik bisnis, pemerintahan, bahkan masyarakat. Penipuan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan adalah dengan melakukan audit investigatif. Audit investigatif adalah proses mengumpulkan dan menganalisis bukti untuk menentukan apakah penipuan telah terjadi. Audit investigatif dapat dilakukan oleh auditor internal, auditor eksternal, atau lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak audit investigatif terhadap pengungkapan kecurangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain laporan penelitian, artikel jurnal dan berita. Temuan menunjukkan bahwa audit investigatif berperan penting dalam mengungkap kecurangan di Indonesia. Audit investigatif dapat memberikan bukti kuat untuk mendukung temuan penipuan. Bukti ini dapat digunakan untuk mengambil tindakan hukum terhadap penipu. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas audit investigatif dalam mengungkap kecurangan:*

- Menyelidiki keterampilan dan pengalaman auditor.
- Ketersediaan sumber daya
- Kerjasama Pihak Terkait

*Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas audit investigatif agar kecurangan dapat dicegah dan dideteksi dengan lebih efektif. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan keterampilan dan pengalaman auditor investigasi, menyediakan sumber daya yang memadai dan menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas audit investigatif di Indonesia dalam mengungkap kecurangan:*

- Meningkatkan standar pendidikan dan pelatihan bagi auditor investigatif
- Menyediakan sumber daya yang memadai untuk audit investigatif
- Menjalinkan kerjasama yang baik antara auditor investigasi, manajemen perusahaan, karyawan dan otoritas pengatur.

**Kata Kunci:** Kecurangan, audit investigatif, pengungkapan kecurangan, Indonesia

## **1. LATAR BELAKANG**

Kejahatan fraud telah terjadi dalam segala aspek kehidupan negara ini. Hal ini dapat kita lihat dari maraknya kasus korupsi serta penggelapan dana yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk kepentingan pribadinya yang dapat merugikan perusahaan serta pemerintah.

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Fraud dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk bisnis, pemerintahan, dan bahkan masyarakat.

Fraud dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, baik bagi perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Di Indonesia, fraud telah menjadi masalah yang serius. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus korupsi, penggelapan dana, dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di berbagai lembaga pemerintahan dan perusahaan.

Kasus-kasus tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara finansial maupun reputasional. Salah satu upaya untuk mencegah dan mendeteksi fraud adalah dengan melakukan audit investigasi. Audit investigasi merupakan proses pengumpulan dan analisis bukti untuk menentukan apakah telah terjadi fraud.

Audit investigasi dapat dilakukan oleh auditor internal, auditor eksternal, atau badan penegak hukum. Audit investigasi memiliki peran penting dalam pengungkapan fraud. Audit investigasi dapat memberikan bukti yang kuat untuk mendukung temuan fraud.

Bukti tersebut dapat digunakan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku fraud. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa audit investigasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan fraud. Semakin kuat audit investigasi, semakin besar kemungkinan fraud akan terungkap. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit investigasi terhadap pengungkapan fraud di Indonesia.

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk laporan penelitian, artikel jurnal, dan berita. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit investigasi memiliki peran penting dalam pengungkapan fraud di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas audit investigasi agar dapat lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi fraud.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Definisi Audit**

Menurut Alvin A. Arens dan Randal J. Elder dalam bukunya *Auditing and Assurance Services an Integrated Approach (2005)*: Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti informasi untuk menentukan apa yang telah dilakukan.

Standar pelaporan yang menetapkan tingkat kesesuaian antar audit informasi harus dikembangkan oleh orang-orang independen yang kompeten.

Audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang memberikan informasi kuantitatif tentang suatu entitas untuk menentukan dan melaporkan tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh audit yang dilakukan oleh lembaga atau individu independen yang kompeten. Jenis audit yang sering digunakan diklasifikasikan menjadi audit kepatuhan, audit keuangan, audit operasional, dan audit investigatif.

### **2.2. Definisi Investigasi**

Signifikansi penyelidikan semacam itu bergantung pada bagaimana penyelidikan tersebut memberikan makna dan tujuan yang ingin disampaikan. Jika dilihat dari sudut pandang profesional akuntan atau auditor, Office of Audit Compliance (OAC) University of Pennsylvania menyatakan pada tahun 2002.

Penyelidikan atau investigasi biasanya memerlukan pengawasan ulang terhadap area operasi, mencari bukti transaksi penipuan, mencari tahu apakah kerugian penipuan telah terjadi, menentukan jumlah kerugian, memahami kelemahan pengendalian aset unit, mencegah terulangnya kembali, dan membantu mengurangi kerugian.

Risiko pengajuan klaim berdasarkan undang-undang asuransi dan penegakan hukum (Investigasi ini dilakukan di area operasional untuk mendokumentasikan setiap penipuan yang terjadi dalam transaksi keuangan tersebut).

Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi apakah telah terjadi penipuan, mendeteksi besarnya kerugian, kemudian juga mengidentifikasi kelemahan dan memberikan saran perbaikan agar penipuan tidak terjadi lagi. Hal ini juga dapat membantu mengklaim asuransi yang sesuai dan menegakkan hukum). Jika ditinjau dari sudut pandang penegakan hukum dan profesional kepolisian, Engkesman R Hillep dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi, Pusat Pendidikan Penelitian dan Penelitian*

Biro Nasional Kepolisian (1998), menyelidiki. Walaupun kedua definisi di atas dilihat dari sudut pandang yang berbeda, namun sebenarnya tujuannya sama, yaitu sama-sama menyangkut permasalahan hukum, yaitu bagaimana proses penyidikan dilakukan, dan kegiatan pengungkapan apakah ada kebenaran atau fakta di dalamnya.

#### 1) Fraud (Kecurangan)

Penipuan diartikan sebagai kecurangan, meskipun agak kurang tepat dan benar karena ada beberapa pandangan yang membedakan kecurangan dengan penipuan. Menurut kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia, Fraud artinya menipu, menipu atau menyelewengkan dana masyarakat. Berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, penipuan berarti ketidakjujuran dan rasa bersalah. Di Indonesia, kata penipuan sering diartikan sebagai korupsi. Hal ini dianggap tidak akurat karena, tergantung pada bentuk penipuan (dibahas di bawah), korupsi merupakan bagian dari penipuan. Dilihat dari revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 20 Tahun 2001), yang disebut penipuan adalah korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini akan pengenalan yang lebih spesifik mengenai korupsi, khususnya di sektor publik.

Beberapa ahli dan organisasi profesi memiliki pemahaman yang sedikit berbeda tentang kecurangan, dan karena metode penipuannya berbeda, maka definisi penipuan juga berbeda. Meski begitu, berbagai definisi mengenai Fraud pada prinsipnya tidak berbeda.

Pengertian kecurangan lebih menitikberatkan pada akibat hukum, seperti korupsi, penipuan pencurian, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan laporan keuangan, dan bentuk-bentuk penipuan lainnya yang dapat merugikan orang lain dan menguntungkan pelakunya. Berikut beberapa kutipan mengenai definisi penipuan.

Dalam karyanya, *Fraud Examination*, W. Steve Albrecht dan Chad D. Albrecht menyajikan definisi penipuan sebagai konsep luas yang mencakup serangkaian metode yang digunakan oleh individu untuk memanipulasi orang lain melalui cara yang menipu dan mendapatkan keuntungan yang tidak adil.

Karena sifatnya, sulit untuk memberikan definisi pasti mengenai penipuan karena mencakup taktik menipu, licik, dan tindakan tidak bermoral yang dapat menipu orang lain. Konsep batasan teoretis, sebaliknya, mengacu pada batasan yang membatasi sejauh mana kepalsuan manusia.

### **2.3. Teori Triangle Fraud**

Konsep Triangle Fraud Theory telah mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Teori ini berpendapat bahwa aktivitas penipuan dapat terjadi ketika tiga individu atau entitas berkolusi untuk melakukan suatu skema. Ketiga entitas tersebut bisa berupa perseorangan, korporasi, atau bahkan badan pemerintah. Teori tersebut menyatakan bahwa kolusi tiga pihak merupakan faktor penting dalam keberhasilan aktivitas penipuan.

Meskipun teori ini masih dieksplorasi, teori ini berpotensi memberikan wawasan berharga mengenai dinamika penipuan dan cara mencegahnya. Donald R. Cressey adalah pencipta teori Segitiga Penipuan, yang bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik perilaku curang. Menurut penelitian Cressey, individu lebih cenderung melakukan penipuan ketika menghadapi kesulitan keuangan yang tidak dapat diselesaikan melalui cara konvensional.

Orang-orang ini mungkin melakukan penipuan, percaya bahwa posisi pekerjaan mereka atau akses terhadap informasi rahasia dapat menyelesaikan masalah mereka, dan mungkin mengalami perubahan dalam keyakinan pribadi mereka.

Mereka yang bertanggung jawab mengelola aset sering kali menganggap dirinya sebagai pengguna utama aset tersebut. Cressey juga mencatat bahwa banyak individu yang terlibat dalam aktivitas penipuan menyadari tindakan mereka yang ilegal namun berusaha untuk menggambarkannya sebagai hal yang normal.

Individu yang melakukan penipuan memerlukan motif dan strategi untuk melaksanakan rencananya, yang disebut sebagai "segitiga penipuan". Kemungkinan melakukan kecurangan terbuka bagi siapa saja, terutama pada organisasi yang lebih besar dengan banyak karyawan yang menempati berbagai posisi.

Industri bisnis sering menghadapi masalah penipuan, terutama di bidang keuangan dan akuntansi. Sayangnya, permasalahan ini muncul karena niat dan upaya pihak-pihak yang terlibat dalam menyembunyikan penipuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan yang bersangkutan.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **1) Jenis penelitian**

Menurut Saryono (2010), "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan, mendeskripsikan, dan membantu menjelaskan kualitas dan karakteristik pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan dengan metode kuantitatif."

2) Sumber data

Menurut Sugiyono (2012, Halaman 141) “Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur, buku, dan dokumen melalui membaca, mempelajari, dan memahami media lain.” Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui Institute of Certified Fraud Examiners.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data perusahaan melalui internet dan mencatat data perusahaan dalam buku-buku yang berisi informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fraud di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan ACFE Indonesia terhadap ratusan responden menunjukkan bahwa kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi sebesar 64,4%, disusul penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan sebesar 28,9%, serta pelaporan penipuan. Keuangan 6,7% Hasil survei ini berbeda dengan laporan nasional. Pada tahun 2018, penipuan terbesar terjadi, yaitu penyalahgunaan aset sebesar 89%, disusul korupsi sebesar 38%, dan terakhir penipuan laporan keuangan sebesar 10%.

Salah satu perbedaan hasil penelitian ini adalah frekuensi pemberitaan skandal korupsi di Indonesia, seperti dilansir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidikan tindak pidana korupsi meningkat dari tahun 2004 hingga 2018 (KPK, 2018). Penipuan yang paling umum adalah Indonesia Survei ini meliputi: Penipuan itu yang paling banyak merugikan Indonesia Itu korupsi. Hingga 167 Responden atau sekitar 69,9% menunjukkan korupsi adalah penipuan.

Hal ini biasanya berbahaya Negara Indonesia. Kemudian Yang berikutnya adalah 50 Responden atau 20,9% menunjukkan penyalahgunaan aset atau Kekayaan nasional dan perusahaan sehingga menimbulkan kerugian. Tempat ketiga adalah 22 responden, terhitung 9,2% Mengajukan laporan keuangan palsu sehingga menimbulkan kerugian.

Menyelidiki peran audit dalam pengungkapan penipuan Tugas utama auditor adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit, yaitu segala bentuk informasi yang digunakan oleh auditor internal untuk menentukan informasi yang akan diaudit berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Arens dan Loebecke, 2007). bukti audit adalah sesuatu yang dapat dibuktikan (Sawyer, 2003) dengan Berdasarkan pemeriksaan, observasi, penyelidikan dan konfirmasi Cukup untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan

yang telah diaudit (Standar Profesional Akuntan Publik, 2006). PSA 32 (SA 316.05) mengatur pertanggungjawaban Tanggung Jawab Auditor atas Kesalahan dan Penyimpangan (Pelanggaran) adalah sebagai berikut:

Auditor ditentukan Tingkat risiko kesalahan atau ketidakberesan yang dapat menyebabkan laporan keuangan salah saji.

- a. Berdasarkan keputusan ini, auditor harus merancang auditnya untuk memberikan keyakinan yang wajar dalam mendeteksi kesalahan dan penyimpangan ini.
- b. Peninjauan juga harus dilakukan secara hati-hati Terapkan skeptisisme profesional yang sesuai dan evaluasi temuan.

Mulyadi (2010:211) menyatakan bahwa fungsi audit internal adalah suatu kegiatan kebebasan yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan dan dicapai dengan cara tertentu Akuntansi, keuangan dan pengawasan kegiatan. Pasal 110 SA menetapkan bahwa auditor bertanggung jawab atas hal tersebut Rencanakan dan tinjau secara berurutan Memperoleh hasil yang memberikan keyakinan yang wajar terhadap isi laporan keuangan Tidak ada salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun bukan Atau curang. tanggung jawab itu Tentu saja untuk menilai kewajaran laporan keuangan dari salah saji Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, informasi yang diaudit Standar dan Kode Etik Akuntan.

Selain itu, peran audit internal adalah untuk memantau penipuan. Audit internal bertanggung jawab untuk Bertanggung jawab untuk membantu manajemen dalam menangani penipuan Risiko diuji, dinilai dan dikendalikan untuk memastikan bahwa tidak ada salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan.

Tanggung jawab ini tentu saja untuk Menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan salah saji informasi. Umumnya menerapkan prinsip akuntansi, standar audit dan kode etik akuntan, peran audit internal adalah memantau penipuan. Peran audit internal adalah untuk mendukung manajemen dalam memitigasi kecurangan dengan melakukan penilaian dan penilaian terhadap potensi risiko, serta menerapkan langkah-langkah pengendalian.

Penipuan terjadi di berbagai sektor. Ada beberapa komponen yang terlibat dalam proses melakukan investigasi penipuan, yang diuraikan di bawah ini: Saat memeriksa penipuan, perlu dilakukan serangkaian langkah yang melibatkan analisis data dan bukti, mengembangkan hipotesis, menguji hipotesis tersebut dengan bukti tambahan, dan menyempurnakan serta menyempurnakan hipotesis. Tujuan di balik pengungkapan

aktivitas penipuan melibatkan penggunaan dokumen dan saksi netral dari pihak ketiga untuk mengungkap pihak-pihak yang bersekongkol dalam tindakan tersebut.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa audit investigatif berperan penting dalam mengungkap kecurangan di Indonesia. Audit investigatif dapat memberikan bukti kuat untuk mendukung temuan penipuan. Bukti ini bisa digunakan untuk mengambil tindakan hukum terhadap si penipu. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas audit investigatif dalam mengungkap kecurangan:

- Selidiki keterampilan dan pengalaman auditor

Auditor investigasi dengan keterampilan dan pengalaman yang memadai akan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dengan lebih efektif.

- Ketersediaan sumberdaya

Audit investigatif memerlukan sumber daya yang memadai seperti waktu, uang, dan tenaga.

- Kerjasama Pihak Terkait

Audit investigatif akan lebih efektif jika didukung oleh pihak-pihak terkait antara lain manajemen perusahaan, karyawan, dan pihak yang berwenang.

Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas audit investigatif agar kecurangan dapat dicegah dan dideteksi dengan lebih efektif.

Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan keterampilan dan pengalaman auditor investigasi, menyediakan sumber daya yang memadai dan menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas audit investigatif di Indonesia dalam mengungkap kecurangan:

- Meningkatkan standar pendidikan dan pelatihan bagi auditor investigasi

Standar pendidikan dan pelatihan auditor investigasi perlu ditingkatkan untuk menghasilkan auditor investigasi yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai.

- Menyediakan sumber daya yang memadai untuk audit investigative

Pemerintah dan dunia usaha perlu menyediakan sumber daya yang memadai, seperti waktu, uang, dan tenaga, untuk audit investigasi.

- Membangun kerja sama yang baik antara auditor investigasi, manajemen perusahaan, karyawan, dan pihak-pihak yang berwenang. Auditor investigasi perlu membangun



kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait agar dapat memperoleh informasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan investigasi.

## 6. SARAN

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas audit investigatif untuk mengungkap penipuan di Indonesia:

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang penipuan  
Ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penipuan, termasuk manajemen perusahaan, karyawan, dan pemberi lisensi.  
Hal ini dapat dicapai melalui sosialisasi, pendidikan dan acara-acara publik.
- Meningkatkan sistem pengendalian internal  
Sistem pengendalian internal yang kuat membantu mencegah dan mendeteksi penipuan. Sistem harus dirancang untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko penipuan.
- Meningkatkan budaya anti-penipuan  
Budaya anti-penipuan yang kuat membantu menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi penipuan. Budaya ini harus ditanamkan di seluruh organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan tingkat bawah.
- Meningkatkan kolaborasi antar instansi  
Kerjasama antar instansi yang berwenang dalam menangani Fraud perlu diperkuat.  
Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim kerja atau mekanisme koordinasi lainnya.
- Memperkuat penegakan hukum  
Penegakan hukum yang tegas terhadap penipuan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penipuan lagi. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap penipu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., & Loebecke, J. K. (2007). *Auditing and Assurance*
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Institute of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2023). *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. ACFE.

- Mulyadi. (2010). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Salemba Empat.
- Sawyer, L. A. (2003). Auditing: Principles and Procedures. Prentice Hall.
- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). (2006). Standar Auditing. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2018). Laporan Kinerja KPK Tahun 2018. KPK.